



**PENGARUH OPTIMALISASI MANAJEMEN ASET DAERAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

***THE EFFECT OF THE OPTIMIZATION OF REGIONAL OWNED-ASSET  
MANAGEMENT TOWARDS THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT OF  
THE GOVERNMENT OF MAKASSAR MUNICIPALITY***

**John Gamara Tangke<sup>1</sup>, Halim<sup>2</sup>, dan Gina Lucita<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.  
e-mail: gmessindung@yahoo.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.  
e-mail: halim108@yahoo.com

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.  
e-mail: gina.lucita.266@gmail.com

**Abstrak**

Manajemen aset daerah penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif. Populasi adalah Pengelola Barang dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan di 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sampel sebanyak 104 orang responden ditetapkan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan uji normalitas, analisis regresi, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian memperlihatkan optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dilihat dari nilai regresi yang menunjukkan angka positif sebesar 0,293 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Untuk itu, sebaiknya Pemerintah Kota Makassar serius menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terutama mengenai permasalahan manajemen aset tetap.

**Kata kunci:** optimalisasi manajemen aset, kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah.

**Abstract**

*Regional Owned-Asset Management is significantly important in creating a good local government financial report. Therefore, the objective of the study is to understand the influence of optimization of Regional Owned-Asset Management toward the quality of financial report. The study applies a quantitative method with a correlative study. The populations of the study are Asset Administrators and the Head of Equipment Sub Division in 52 Local Government agencies consists of 104 respondents assigned in purposive sampling. The data is gathered by distributing questionnaires and research papers. The data is analyzed by taking normality test, regression analysis, and hypothesis test with SPSS. The result of the study shows that the optimization of Regional Owned-Asset Management positively influenced the quality of financial report of the*

*Makassar Municipality significantly. This can be seen from the value of regression that shows a positive value as 0.293 and significant value as  $0.000 < 0.05$ . Therefore, The Makassar Municipality should seriously follow-up the recommendations of BPK (Audit Board of the Republic of Indonesia) in BPK's Audit Reports, particularly regarding Asset Management problems.*

**Keywords:** *asset management optimization, financial report quality, local government.*

## PENDAHULUAN

Titik berat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terletak di kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kemandirian dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

saat ini karena pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan aset daerah yang baik. Artinya bahwa, upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*.

Pengelolaan aset daerah yang optimal diatur secara normatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, aset daerah harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan konteks tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memberikan penekanan bahwa tujuan diterbitkannya Permendagri dimaksud adalah agar BMD dikelola dengan baik dan benar, mengingat BMD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian nilai aset pemerintah daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dirilis oleh BPK, meskipun persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat dalam

kurun waktu TA 2009 sampai dengan 2013 dan persentase opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta opini tidak memberikan pendapat (TMP) menurun, pada tingkat pemerintah kota, jumlah opini WDP masih lebih banyak dibandingkan dengan opini WTP.

Kondisi serupa terjadi pada Pemerintah Kota Makassar dimana dalam kurun waktu TA 2009 sampai dengan TA 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar masih bertahan dengan opini WDP disebabkan antara lain oleh adanya pengecualian atas aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Optimalisasi manajemen aset daerah merupakan kebijakan penting bagi pemerintah daerah karena di dalamnya terdapat sasaran strategis yang bisa diwujudkan dan dapat ditempuh dengan: identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; penerapan sistem informasi manajemen aset daerah; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai independen (Mardiasmo, 2004).

Di pihak lain, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (publik) ditentukan oleh sejauhmana laporan keuangan tersebut dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: dapat diandalkan, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Bastian, 2006).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh optimalisasi manajemen aset daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan tujuan di atas, terdapat dua hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, yaitu:

$H_0$  : Optimalisasi manajemen aset daerah (X) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_1$  : Optimalisasi manajemen aset daerah (X) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelatif.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah Pengurus Barang dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar. Sampel sebanyak 104 (seratus empat) orang responden ditetapkan secara *purposive sampling*, yakni masing-masing 1 (satu) orang Pengurus Barang dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Tipe dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data terdiri atas menyebarkan kuesioner dan telaah dokumen.

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data berupa *editing*, tabulasi, dan mengolah data dengan menggunakan aplikasi *Statistical Packages for Social Science (SPSS)* versi 21.0.0 (*SPSS* versi 21.00).

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji signifikansi koefisien korelasi sederhana (uji t). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah Variabel X berpengaruh signifikan terhadap

Variabel Y. Uji t juga digunakan untuk mengambil keputusan dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. dasar pengambilan keputusan atas hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  :
  - a. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
  - b. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
2. Berdasarkan nilai signifikansi *output SPSS*:
  - a. Jika nilai *Sig.*  $< 0,05$ , maka Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
  - b. Jika nilai *Sig.*  $> 0,05$ , maka Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.

Adapun tingkat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 95% sehingga pengujian menggunakan uji dua sisi untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Rumus untuk mencari nilai  $t_{tabel}$  adalah (tingkat kepercayaan dibagi dua; jumlah responden dikurangi jumlah variabel) atau dengan formulasi:  $t_{tabel} = (\alpha/2; df = n-k)$ .

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.297	5.206		3.515	.001
Variabel Optimalisasi Manajemen Aset Daerah X	.293	.042	.589	6.951	.000

*Dependent Variable:*

Variabel\_Kualitas\_Laporan\_Keuangan\_Pemerintah\_Daerah\_Y

## HASIL PENELITIAN

Hasil uji regresi dan uji hipotesis disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai regresi menunjukkan angka positif sebesar 0,293 yang berarti Variabel X berpengaruh positif terhadap Variabel Y. Selanjutnya, nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 6,951 dan nilai

*Sig.* sebesar 0,000. Adapun nilai  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1,986 yang diperoleh dengan menggunakan  $t_{tabel} = (0,05/2; 93-2)$  atau (0,025;91). Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (6,951 > 1,986)
2. Nilai *Sig.* 0,000 < 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$ : Optimalisasi Manajemen Aset Daerah (X) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Adapun sifat pengaruhnya adalah positif dan signifikan.

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis yang membuktikan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima menunjukkan bahwa jika Pemerintah Kota Makassar melakukan Optimalisasi Manajemen Aset Daerah berupa identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, penerapan sistem informasi manajemen aset daerah, pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan aset, serta pelibatan berbagai profesi atau keahlian terkait aset daerah, maka akan m e m b e r i k a n pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Neraca Pemerintah Kota Makassar karena

informasi yang disajikan di dalamnya memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2004) bahwa salah satu tujuan strategis yang ingin dicapai dalam optimalisasi manajemen aset daerah adalah tersedianya informasi

akurat mengenai jumlah aset daerah. Informasi akurat tersebut merupakan dasar yang digunakan dalam menyusun neraca pemerintah daerah.

Selanjutnya, penelitian ini juga sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang mengungkapkan bahwa permasalahan manajemen aset adalah kendala utama Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar meraih opini WTP dari BPK. Manajemen aset pada Pemerintah Kota Makassar yang belum memadai menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar masih bertahan pada opini WDP dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar hendaknya mengoptimalkan manajemen aset daerah agar Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar meningkat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah serius menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terutama mengenai permasalahan manajemen aset tetap yang berpengaruh terhadap opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Rekomendasi tersebut antara lain terkait koordinasi dan rekonsiliasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dengan seluruh SKPD, identifikasi dan inventarisasi aset-aset Pemerintah Kota Makassar yang dikuasai oleh pihak ketiga, serta tanggung jawab Pengurus Barang dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada SKPD yang memiliki masalah manajemen aset daerah.

#### REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Kasmadi dan Nia Siti Sunariah. 2013. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Sufren dan Yonathan Natanael. 2014. Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.